

ABSTRAK

Dalam rangka mencari alternatif pembiayaan dunia bisnis Indonesia mulai mencoba menggunakan lembaga *leasing*. Walaupun dalam praktiknya lembaga ini dapat diandalkan, namun dari segi hukum timbul permasalahan oleh karena lembaga *leasing* yang berasal dari sistem hukum asing sementara Indonesia memiliki Sistem Hukum Perikatan tersendiri. *Leasing* berbeda dengan perjanjian jual-beli, sewa menyewa, sewa beli, jual beli dengan angsuran dan jual beli dengan hak membeli kembali karena *leasing* memiliki unsur pembeda dimana obyeknya merupakan barang modal. Eksistensi akta otentik terhadap perjanjian *leasing* tersebut ada apabila transaksi yang dilakukan dengan nominal besar. *Leasing* tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi diatur dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian penulisan tesis ini yaitu preskriptif analisis. Data yang digunakan sebagai bahan analisis penelitian tesis ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya berkaitan erat dengan hak kebendaan yang pada salah satu pihak menyangkut batas-batas hak dan kewajibannya. Hubungan *Lessor* dengan *Lessee* sering diwarnai dengan berbagai persoalan, dan yang sering terjadi adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari *Lessee* pada *Lessor*. Apabila perjanjian dilakukan dengan akta otentik kepastian hukum *lessor* maupun *lessee* lebih terjamin dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau kembali atau membuat aturan terhadap perjanjian *leasing* didalam perundang-undangan.

Kata Kunci: Perjanjian leasing, akta otentik, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

In order to find alternative financing for the Indonesian business world, they are starting to try using leasing agencies. Although in practice this institution is reliable, problems arise from a legal perspective because the leasing agency comes from a foreign legal system while Indonesia has its own legal system of engagement. Leasing is different from a sale and purchase agreement, leasing, buying and selling with installments and buying and selling with the right to repurchase because leasing has a distinguishing element where the object is a capital good. The existence of an authentic deed against the leasing agreement exists if the transaction is carried out with a large nominal. Leasing is not regulated in the Civil Code, but is regulated in Presidential Decrees and Ministerial Decrees.

The type of research used is normative juridical research. The nature of this thesis writing research is prescriptive analysis. The data used as material for the analysis of this thesis research is secondary data. The data collection tool in this research was carried out by means of library research and field studies. The analysis was carried out by means of qualitative analysis.

The results of the research show that it is closely related to material rights which on one side concern the limits of their rights and obligations. The relationship between the lessor and the lessee is often colored by various problems, and what often happens is the delay in fulfilling the obligations of the lessee to the lessor. If the agreement is carried out with an authentic deed, the legal certainty of the lessor or the lease is more guaranteed and recommends to the government to review or make rules for the leasing agreement in the legislation.

Keywords : Leasing agreement, Authentic certificate, Legal protection.